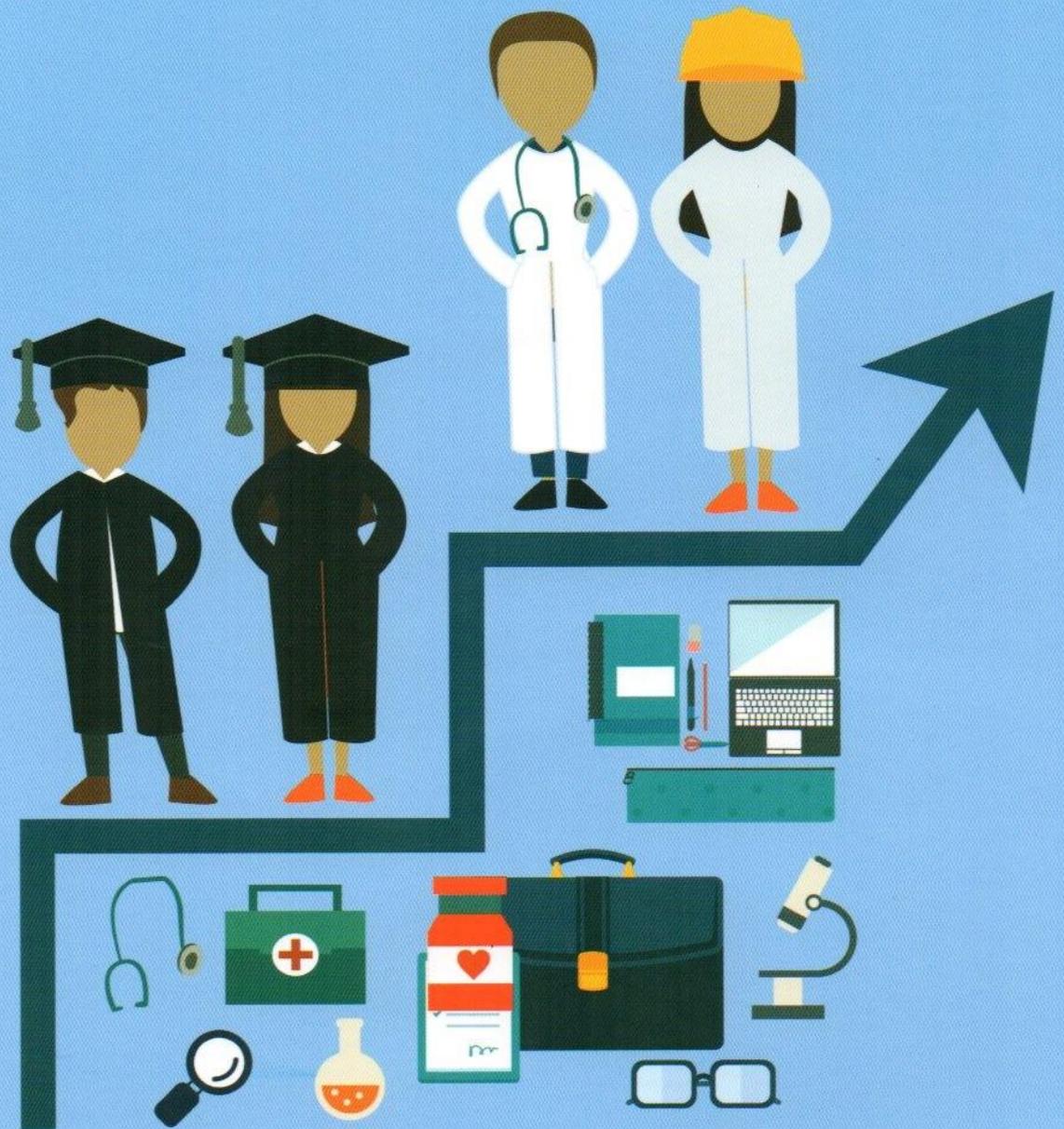


ristekdikti

Volume 6 | 1 | 2016

Membangun Kehidupan yang Cerdas



**MENJAWAB
TANTANGAN MEA**



9 772502 734882



Foto : Fatimah

Direktur Pembinaan Kelembagaan Komitmen dan Kerjasama dalam Pembinaan PTS

Oleh : Lalang dan Syarif
Foto : Gama dan Fatimah

Setelah menonaktifkan sekian banyak perguruan tinggi yang dinilai melanggar proses pendidikan tinggi, langkah Kemristekdikti dalam melakukan pembinaan terhadap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menunjukkan hasil positif.

Gebrakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dalam melakukan pembenahan dunia pendidikan tinggi khususnya kalangan PTS mendapat apresiasi masyarakat. Setelah melakukan pembinaan, dari 243 PTS yang menjadi sorotan, kini telah mengerucut menjadi 23 PTS.

Dalam melakukan perbaikan terhadap sejumlah kampus yang dibina, Direktur Pembinaan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Kelembagaan Pendidikan Tinggi, Kemristekdikti, Totok Prasetyo memiliki pendekatan tersendiri. Menurutnya, dalam tahap pembinaan mesti dipahami terlebih dulu problematika di perguruan tinggi terkait. Karena terkadang permasalahannya tidak sesederhana seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Bedasarkan pengamatannya, permasalahan di perguruan tinggi ada yang dikarenakan rasio antara dosen dan mahasiswa, ada yang karena tidak melapor, ada yang tidak mendapat mahasiswa serta banyak hal lainnya. "Masalah di perguruan tinggi itu cukup kompleks. Kita harus cermat melihat problemnya untuk

memberikan solusi yang tepat," tegasnya.

Solusi yang diberikan Kemristekdikti dapat melalui berbagai macam cara. Termasuk sampai memberikan rekomendasi untuk mengganti pimpinan perguruan tinggi atau rektor. Untuk solusi tersebut, Kemristekdikti hanya mampu memberikan rekomendasi, karena kewenangan mengganti pimpinan perguruan tinggi hanya dimiliki oleh pihak yayasan pengelola. "PTS yang responsif manakala kita beri tahu bahwa kondisinya tidak baik, lalu kemudian sadar akan permasalahannya sendiri dan mau bangkit kembali, maka dia akan cepat aktif," jelas Totok Prasetyo.

Selain rekomendasi solusi, pendampingan, dan evaluasi dari Kemristekdikti, komitmen dari PTS terkait juga sangat dibutuhkan. Totok berharap, perguruan tinggi yang termasuk dalam pembinaan, mau bekerjasama secara serius. "Jika niatnya memang serius membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa, maka mari kita saling bekerjasama dan bersinergi secara positif agar kembali menjadi kampus yang aktif," tegasnya.

Totok menambahkan, Kemristekdikti sudah memberi kelonggaran dalam tanda petik untuk melakukan perbaikan rasio dosen dan mahasiswa. Yakni dengan memperpanjang waktu untuk merekrut dosen-dosen baru hingga 30 Juni 2016.

Diantara PTS yang berkomitmen dalam pembinaan, sehingga dapat diaktifkan kembali perkuliahannya adalah Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri, Jawa Timur. "Salah satu yang bagus dalam pembinaan dan sudah menjadi kampus aktif adalah UNP Kediri. Kenapa UNP bisa cepat *recovery*? Karena mereka mampu menjalani komitmen dan menerapkan pakta integritas yang kita sepakati," ungkap Totok Prasetyo.

Perguruan tinggi yang berhasil menunjukkan perbaikan tersebut diharapkan menjadi model percontohan, sehingga kepercayaan publik pada PTS menjadi pulih serta mampu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Hingga saat ini, Kemristekdikti bersama jajaran Kopertis, terus memonitor sejauh mana perkembangan PTS-PTS tersebut.

Geliat Perbaiki UNP Kediri

Ketika Kemristekdikti pada 9 November 2015 mengumumkan bahwa UNP Kediri resmi kembali menjadi kampus yang aktif, sontak ribuan mahasiswa dan civitas akademika menyambut gembira dengan melakukan sujud syukur dan acara syukuran.

Kegembiraan tersebut bukan tanpa perjuangan keras serta komitmen yang kuat dari PTS itu sendiri. Mengingat sebelumnya UNP Kediri dinonaktifkan oleh Kemristekdikti dengan sejumlah

dugaan pelanggaran. Reaksi yang pertama kali dilakukan oleh pihak Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi (YPLP PT) PGRI Kediri ialah membentuk tim penyehatan.

Kemudian mereka mengambil langkah-langkah strategis untuk berkoordinasi langsung dengan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur serta tim penyehatan Kemristekdikti yang diketuai Prof. Supriadi Rustad. "Alhamdulillah, kami cepat bangkit



Foto



Foto

berkat dukungan luar biasa dari Kopertis VII Jawa Timur dan Tim Kemristekdikti yang selalu terbuka dan siap melayani," ucap Ketua Pembina YPLP PT PGRI Kediri Prof Soegiono.

Rekomendasi Kemristekdikti kepada UNP Kediri antara lain harus mengganti manajemen kepemimpinan dan mengambil langkah konkret memperbaiki

kinerja akademik. Hal tersebut langsung dijalankan dengan mengganti rektor tanpa mencuatkan riak masalah di internal mereka.

Keberhasilan tersebut diapresiasi pula oleh Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Ali Maksum. "Saya kira ini menarik, di tempat lain tidak seperti ini. Pasalnya mengganti pimpinan PTS atau rektor itu tidak mudah, belum lagi adanya

demo mahasiswa yang mendukung kampusnya untuk diaktifkan," jelas Ali Maksum.

Ia pun mengisahkan bagaimana perjuangan Kopertis VII dan Kemristekdikti ketika turun ke lapangan dalam melakukan upaya pembinaan. Ali Maksum bahkan harus berhadapan dengan para mahasiswa yang melakukan demonstrasi. "Kita minta mahasiswa



Foto: Gama

43 (1:43). Dengan demikian secara umum rasio tersebut telah memenuhi apa yang disyaratkan oleh Kemristekdikti.

UNP Kediri pun berupaya meningkatkan kualitas dosen dengan menyekolahkan mereka ke jenjang S3. Hingga semester ini, sudah ada 46 dosen yang terdaftar sebagai mahasiswa S3. "Semoga dua tahun ke depan mereka sudah lulus, sehingga UNP Kediri bakal memiliki 68 dosen bergelar doktor," tutur Sulistiono. Berikutnya, semua penyelenggaraan kelas di luar kampus atau kelas jauh pun ditarik, dan pelaksanaannya diselenggarakan di kampus.

Lebih jauh lagi, pihak rektorat secara inisiatif meminta kepada yayasan untuk melakukan perbaikan terhadap statuta sebagai kunci untuk memperbaiki kinerja kelembagaan. Hal ini bedasarkan evaluasi mereka selama satu semester yang menunjukkan terdapat beberapa kelemahan pada statuta lama.

"Statuta yang kami usulkan agar ada

agar tidak anarki dan tetap tertib, sebab budaya kampus harus mengedepankan intelektual dan moral," paparnya.

Rektor UNP Kediri Sulistiono. Langkah konkret berikutnya ialah menata rasio dosen - mahasiswa dengan memverifikasi data tersebut pada Forlap PG DIKTI. Ternyata sebelumnya banyak mahasiswa yang sudah lulus namun masih terdaftar di Forlap Dikti, sehingga rasionya menjadi 1 berbanding 200 (1:200). Kemudian UNP Kediri merekrut 90 dosen baru, sehingga rasio dosen - mahasiswa menjadi 1 berbanding

Pergantian manajemen kepemimpinan tersebut, menghasilkan keputusan untuk menunjuk Sulistiono sebagai Rektor UNP Kediri. "Waktu itu memang ada penunjuk langsung dengan pertimbangan masa darurat," ungkap



Foto: Gama



Foto : Gama



Foto : Gama



Foto : Gama

perubahan terutama pada visi misi dengan menjadikan UNP perguruan tinggi teladan di bidang Tridharma perguruan tinggi. Untuk bisa mencapai itu, langkah yang kami lakukan berkomitmen memperbaiki kinerja akademik dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan aturan yang ada," pungkas Sulistiono.

Dengan upaya dan keberhasilan tersebut, kini UNP Kediri merupakan PTS pertama di Wilayah Kopertis VII Jawa Timur yang menjadi pelopor dan model percontohan dalam keberhasilan pembinaan PTS. Ketua YPLP PT Kediri Juli Sulaksono pun

bersyukur dengan kesuksesan tersebut. "Alhamdulillah UNP Kediri menjadi percontohan perguruan tinggi yang semula tidak aktif dan tidak sehat, dengan cepat menjadi aktif dan sehat," ungkap Juli.

Peristiwa penonaktifan perguruan tinggi ini diharapkan oleh oleh Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Ali Maksum dapat menjadi pembelajaran penting bahwa semua pihak harus mempunyai komitmen terhadap kewajiban membangun pendidikan yang bermutu dan akuntabel. "Jadi harus ada komitmen kuat di

lingkungan institusi Perguruan Tinggi kita sesuai aturan main dan sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi kita," tegasnya.

Guru Besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini pun mengajak agar semua mengacu pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bahwasanya pendidikan tinggi bersifat nirlaba. Sehingga keliru jika bergerak di pendidikan tinggi tetapi lebih berorientasi pada motif ekonomi dan tidak memerhatikan mutu.